

**DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENDUKUNG PALESTINA  
MENJADI NEGARA PENINJUA DI PBB TAHUN 2012**

Oleh:

**Saibatul Aslamiah<sup>1</sup>**

(saibatula@gmail.com)

**Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si**

**Bibliografi : 6 Jurnal, 16 Buku, 6 Working Paper, 3 Dokumen, 15 Website, 2 Majalah**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax.  
0761-63277

***Abstrak***

*This research aims to describe the efforts of Indonesia<sup>1</sup> to support Palestinian struggle to increase its status in the United Nation. After failed to become a UN member states in 2012, Palestine seeked non-member observer state status for Palestine on the basis of Palestine's pre-1967 borders 29 November 2012. Indonesia as a UN member state and also has a close relation with Palestine was played a role in supporting it.*

*Authors applied multilateral diplomacy from G. R. Berridge and Sumaryo Suryokusumo to describe Indonesian government diplomacy toward another UN member states in the United Nations General Assembly proses. Authors also used multitrack diplomacy from Dr. Luoise Diamond and John McDonald to describe another Indonesian efforts to support Palestine independency.*

*This reseacrh shows that Indonesia played a significant role in supporting Palestine to collect internasional recognition to its independency. Throughout multilateral diplomacy proses in the United Nations General Assembly, Indonesian government took all the possible role to support Palestine application to become a non-member observer state, by became a co-sponsor for the application, came to the assembly, gave supporting speech at the debate session and vote to support the application. In another way Indonesian people have done many kinds off support for Palestine that authors explain by using multitrack diplomacy.*

*Keywords: multilateral diplomacy, non-member observer state, Palestine, United Nation, sovereignty.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2009

## Pendahuluan

Palestina telah memulai perjuangan kemerdekaannya sejak tahun 1948, setelah Yahudi secara sepihak mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Dengan didukung oleh negara-negara Arab, Palestina berupaya mengusir Israel, namun gagal dan berakhir dengan semakin luasnya penguasaan Israel terhadap tanah Palestina. Tahun 1964 didirikan *Palestine Liberation Organization* (PLO) atau Organisasi Pembebasan Palestina.<sup>2</sup> PLO merupakan induk bagi berbagai organisasi pembebasan Palestina yang ada saat itu dan menolak mengakui adanya negara Israel. PLO menjadi satu-satunya organisasi yang diakui mewakili Palestina di kancah internasional. PLO mendapat pengakuan sebagai perwakilan resmi bangsa Palestina dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada tahun 1969. Kemudian keberadaan PLO diakui *The United Nations General Assembly* pada 22 November 1974.<sup>3</sup>

Pada 15 November 1988 PLO mendeklarasikan berdirinya negara Palestina di Aljiria, ibu kota Aljazair. Israel dan negara-negara kuat yang mendukungnya seperti Amerika Serikat tidak mengakui kemerdekaan Palestina, dan Israel tetap melanjutkan pendudukannya di wilayah Palestina. Sedangkan di PBB, walaupun PLO sudah diterima sebagai paninjau yang mewakili Palestina tahun 1974, deklarasi kemerdekaan Palestina tidak mengubah status tersebut.

Palestina merubah strategi perjuangan kemerdekaannya dengan beralih ke jalur diplomasi. Tahun 1993 Palestina secara tidak langsung mengakui keberadaan Israel dengan menerima rancangan solusi dua negara sesuai resolusi PBB No: 181 tahun 1947, yaitu wilayah Palestina dibagi

menjadi dua negara untuk Israel dan Palestina sesuai dengan batas-batas dalam resolusi tersebut. Israel kemudian mengakui keberadaan PLO dan menerima upaya perundingan damai, kedua negara saling mengakui eksistensi masing-masing dan menghasilkan Kesepakatan Oslo pada September 1993.

Perundingan damai terus dilakukan Palestina dan Israel dengan dibantu pihak ketiga seperti Amerika Serikat. Upaya ini menghasilkan berbagai perjanjian seperti Kesepakatan Oslo II tahun 1995, *Way River* tahun 1998, Camp David II tahun 2000, *Arab Initiative Peace* dan *Road Map*. Namun posisi Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel cenderung memihak pada Israel.<sup>4</sup> Berbagai hasil perundingan dan kesepakatan yang ada tidak kunjung memberikan kedaulatan penuh bagi Palestina. Pada faktanya Israel masih tetap mengontrol wilayah Palestina, membangun pemukiman Yahudi ilegal di tanah Palestina dan bahkan melakukan agresi militer ke wilayah Palestina dengan dalih memerangi teroris namun banyak memakan korban sipil.

Palestina kemudian melakukan upaya untuk meningkatkan pengakuan internasional atas kedaulatannya dengan harapan Palestina dapat menguatkan posisi tawarnya dalam perundingan dengan Israel sekaligus pengakuan *de jure* atas Palestina sebagai negara yang merdeka sesuai batas teritorial tahun 1967.<sup>5</sup> Tahun 2011 Palestina di bawah kepemimpinan Mahmoud Abbas memasukkan proposal untuk menjadi

---

<sup>4</sup> Vera Ellen Paat. *Posisi Amerika Serikat dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel*.

Fisip Unsrat. Hlm: 8

<sup>5</sup> Demeiati Nur Kusumaningrum. *Diplomasi Palestina Untuk Merdeka dan Menjadi Anggota Penuh PBB Tahun 2011*. 2011.

<[http://www.slideshare.net/demeiati\\_n\\_kusumaningrum/diplo-masi-palestina-untuk-merdeka-dan-menjadi-anggota-penuh-pbb-tahun-2011](http://www.slideshare.net/demeiati_n_kusumaningrum/diplo-masi-palestina-untuk-merdeka-dan-menjadi-anggota-penuh-pbb-tahun-2011)>, Diakses pada 24 September 2013.

---

<sup>2</sup> Mutiara Dewi, et. Al, 2008. *Gerakan Rakyat Palestina: Dari Deklarasi Negara Israel Sampai Terbentuknya Negara Palestina*, (UNY,). Hlm. 12.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 13

anggota penuh PBB. Namun pada 11 November 2011 Palestina gagal mendapatkan rekomendasi Dewan Keamanan PBB. Tahun 2012 Palestina melanjutkan upayanya dengan mengajukan resolusi yang akan menjadikan Palestina sebagai negara peninjau (*non-member observer state*) di PBB melalui Majelis Umum PBB. Draf resolusi dibahas pada 29 November 2012.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Landasan utama sikap Indonesia ini adalah amanat konstitusi negara, menyatakan bahwa Indonesia menolak penjajahan. Faktor lain adalah faktor berlatar belakang agama. Masyarakat Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar dunia memiliki simpati yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurut M. Muttaqien<sup>7</sup> konflik Arab-Israel juga merupakan isu penting bagi politik luar negeri Indonesia, sehingga opini publik terkait isu ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan luar negeri. Indonesia merupakan anggota aktif dari berbagai organisasi internasional seperti OKI dan GNB yang memiliki perhatian khusus terhadap konflik Israel-Palestina. Sehingga menjadi penting bagi Indonesia untuk menunjukkan keseriusannya dalam upaya mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Salah satunya

dengan menggalang dukungan bagi peningkatan status Palestina di PBB.

### **Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, dibutuhkan adanya landasan teori yang sesuai dengan berbagai fenomena yang ada sehingga penulis dapat menemukan jalan menuju hipotesa. Pada penelitian ini tingkat analisa yang dipakai adalah tingkat analisa negara bangsa (*nation-state*). Menurut Mohtar Mas'ood<sup>8</sup> penelitian difokuskan pada tingkat analisa negara bangsa karena dalam hubungan internasional pada umumnya didominasi oleh perilaku negara-bangsa. Indonesia sebagai negara merupakan aktor dalam diplomasi mendukung ditingkatkannya status Palestina menjadi negara peninjau di PBB tahun 2012.<sup>9</sup> Penulis menggunakan perspektif realis, dimana *power* merupakan komponen utama yang mempengaruhi perilaku aktor-aktor internasional. Hubungan internasional didominasi oleh perjuangan mengejar kekuasaan demi memenuhi kepentingan nasional masing-masing. Upaya untuk mempengaruhi negara lain dilakukan berdasarkan kekuatan yang bisa diraih oleh suatu negara.<sup>10</sup>

Penulis akan menggunakan teori-teori diplomasi untuk menjelaskan bagaimana upaya diplomasi Indonesia. Menurut Sumaryo Suryokusumo<sup>11</sup> diplomasi merupakan satu bagian vital dalam kehidupan negara dan menjadi sarana utama dalam menangani masalah internasional demi mencapai perdamaian dunia. Dalam rangka mencapai tujuannya serta mendapat

---

<sup>6</sup> UNISPAL. *Chronological Review of Events Relating to the Question of Palestine*. Monthly media monitoring review. September 2012.

<<http://unispal.un.org/Unispal.Nsf/e9abb7dfb6e319c90525675900535dba/66727ecc7511302a85257aad006d0912?OpenDocument#In%20his%20address%20to%20the%20sixty-seven>> diakses 15 Desember 2014.

<sup>7</sup> M. Muttaqien. *Domestic Politics and Indonesia's Foreign Policy on the Arab-Israeli Conflict*, Departemen of International Relations Universitas Airlangga, Surabaya Global & Strategis, Th. 7, No. 1 Global & Strategis, Januari-Juni 2013. Hlm 69-70.

---

<sup>8</sup> Mohtar Mas'ood, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3S, Hlm: 41.

<sup>9</sup> Robert Jackson & Georg Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm: 54.

<sup>10</sup> Mohtar Mas'ood, *Op. cit.* Hlm: 223

<sup>11</sup> Sumaryo Suryokusumo, 2004. *Praktik Diplomasi*. Bp Iblam: Depok. Hlm: 1.

dukungan atas prinsip-prinsip yang dianutnya negara melakukan diplomasi. Diplomasi merupakan proses politik yang dilakukan demi menjaga kebijakan luar negeri suatu pemerintah dan mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lainnya.

Suryokusumo<sup>12</sup> menjelaskan bahwa dalam diplomasi terdapat berbagai segi. Salah satunya adalah diplomasi multilateral, atau diplomasi antar tiga atau lebih negara. Diplomasi multilateral disebut juga dengan diplomasi konferensi karena biasanya diplomasi model ini berlangsung selama konferensi antar negara-negara. G. R. Berridge<sup>13</sup> juga memasukkan diplomasi multilateral sebagai salah satu model dalam diplomasi. Organisasi internasional selalu menggunakan diplomasi multilateral sebagai sarana dalam mengambil suatu kesepakatan atas suatu permasalahan. Seperti PBB, diplomasi multilateral menjadi bentuk diplomasi permanen di lembaga ini.

PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki 193 negara anggota, Majelis Umum PBB yang merupakan agenda musyawarah utama pengambilan kebijakan dan merupakan organ representatif dari PBB. Majelis Umum ini diikuti oleh seluruh anggota, dimana diplomasi multilateral permanen berlangsung. Keputusan dalam sidang ini memerlukan mayoritas dua pertiga suara dari seluruh anggota. Setiap negara memiliki satu suara<sup>14</sup>.

Setelah Palestina gagal menjadi anggota penuh PBB tahun 2011, Palestina mengajukan draf resolusi peningkatan statusnya menjadi negara peninjau di PBB. Draft resolusi ini dibahas pada sidang Majelis Umum PBB yang dilaksanakan pada

29 November 2012 di markas besar, PBB New York. Upaya Palestina ini menjadi hal yang tidak mudah mengingat Israel dan sekutu dekatnya Amerika Serikat yang merupakan salah satu dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB menyatakan menolak draf resolusi ini, sehingga Palestina membutuhkan dukungan dari negara-negara lain untuk membantu Palestina mendapatkan persetujuan dari Majelis Umum PBB. Indonesia sebagai salah satu anggota penuh PBB juga menjadi bagian dari Sidang Majelis Umum PBB, dimana diplomasi multilateral berlangsung, memberikan dukungan penuh bagi upaya Palestina ini.

Selain diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui diplomasi multilateral di PBB, rakyat Indonesia juga banyak memberikan kontribusi bagi perjuangan Palestina, yang semakin mengautkan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Untuk menjelaskan fenomena ini penulis menggunakan teori diplomasi multijalur (*multitrack diplomacy*). Diplomasi multijalur merupakan salah satu usaha untuk menjaga dan menciptakan perdamaian dunia yang fokus pada *positive peace*, yaitu perdamaian jangka panjang yang memiliki dampak positif dalam jangka waktu yang lama (permanen).<sup>15</sup> Dr. Luoise Diamond and John McDonald<sup>16</sup> memaparkan bahwa diplomasi multijalur adalah sebuah konsep dalam melihat proses perdamaian dunia secara utuh sebagai sistem yang hidup. Di dalamnya memuat konsepsi bahwa sebuah negara mampu berhasil dalam sebuah diplomasi bukan hanya ditentukan oleh diplomasi yang dilakukan aktor *government* saja, akan tetapi juga aktor-

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm 59.

<sup>13</sup> G. R. Berridge, *Diplomacy, Theory and Practice Second Edition*, Palgrave, London, 2002, hlm 146.

<sup>14</sup> *About the General Assembly, Functions and Power*. <<http://www.un.org/en/ga/about/index.shtml>> Diakses tanggal 12 Februari 14

---

<sup>15</sup> Permadi, Dedy. *Media Masa Sebagai Instrumen Diplomasi Amerika Serikat Dalam Kasus Invasi Ke Irak Dan Afganistan*. Jurnal Ilmiah Scriptura, Vol. 3, No. 2, 2009. hal 143.

<sup>16</sup> The Institute for Multi-Track Diplomacy, *Nine Tracks in the Multi-Track System*. <[http://imtd.server295.com/?page\\_id=119](http://imtd.server295.com/?page_id=119)>, [diakses 10 Juni 2013]

aktor di luar pemerintah yang dapat diberdayakan untuk mendukung diplomasi. Dengan kata lain, diplomasi tidak hanya dilakukan hanya oleh lembaga pemerintah tetapi juga oleh semua segmen dalam masyarakat.

## **Isi Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Palestina**

Selama tahun 1516 sampai 1917 wilayah Palestina berada pada penguasaan Khilafah Utsmaniyah (berpusat di Turki). Tahun 1897 Yahudi mendirikan Organisasi Zionisme Internasional yang dipimpin oleh Theodore Herzl yang merupakan gerbang aktivitas politik Yahudi dalam upaya mewujudkan negara Yahudi di Palestina. Upaya mewujudkan cita-cita ini mendapat dukungan dari negara-negara besar saat itu, terutama Inggris. Untuk negara-negara barat wilayah Palestina memiliki arti penting sebagai wilayah yang dapat menghubungkan kekuatan antar Islam di Asia dan Afrika. Pada Konferensi London (1905-1907) muncullah gagasan pendirian “negara tirai” di wilayah ini sebagai pemecah kekuatan negara-negara Islam.<sup>17</sup> Hal ini kemudian menjadi sejalan dengan cita-cita Yahudi yang ingin mendirikan negaranya di wilayah.

Tahun 1917 terjadi peristiwa Deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang dilakukan oleh Menlu Inggris Arthur James Balfour kepada pemimpin Yahudi Inggris tentang komitmen Inggris dalam mendukung perwujudan negara Yahudi di tanah Palestina. Perang Dunia Pertama yang terjadi tahun 1914 berakhir dengan kemenangan Sekutu pada tahun 1918. Palestina kemudian jatuh pada penguasaan Inggris, dan bangsa Yahudi mulai melakukan migrasi besar-besaran ke

Palestina dari seluruh dunia, meskipun sangat ditentang oleh penduduk Palestina. Tentara Yahudi yang bersenjata melakukan banyak tindakan kekerasan dan pengusiran terhadap penduduk Palestina dengan merampas tanah-tanah mereka dan menjadikannya pemukiman bagi Yahudi yang datang ke wilayah ini.<sup>18</sup>

Pada tahun 1947 Inggris membawa konflik ini ke PBB yang kemudian mengeluarkan resolusi no. 181, yang berisi penghentian mandat Inggris di Palestina, penarikan angkatan bersenjata Inggris dan pembagian batas antara dua negara dan status Jerusalem sebagai kota internasional di bawah administrasi PBB. Dalam rencana ini Bangsa Yahudi yang hanya 30% dari total jumlah penduduk yang ada saat itu memperoleh 55% dari seluruh wilayah tanah Palestina. Yahudi menerima resolusi tersebut sedangkan Palestina dan negara-negara Arab menolak karena dianggap tidak adil karena Yahudi memperoleh tanah yang lebih banyak dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit.

Pada 14 Mei 1948, sehari sebelum mandat Inggris berakhir dan diserahkan ke PBB, bangsa Yahudi dengan berpijak pada resolusi PBB memproklamasikan didirikannya negara Israel. Palestina bersama negara-negara kemudian memulai perjuangannya untuk berdaulat dan bebas dari Israel yang telah menjajah dan merampas tanah mereka untuk mendirikan negara Israel.<sup>19</sup> Bangsa Palestina yang berada di wilayah deklarasi Israel kemudian berakhir menjadi pengungsi setelah pengusiran oleh bangsa Yahudi. Pada tanggal 11 Mei 1949, Israel diterima menjadi Anggota PBB dengan dukungan sepenuhnya dari Dewan Keamanan PBB.

---

<sup>17</sup> Muhsin Muhammad Shaleh. *Palestina, Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi*. Gema Insani Perss. Jakarta 2002. Hlm: 32.

---

<sup>18</sup> Nor Mohd Roslan. *Konflik Israel Palestin dari Aspek Sejarah Moderen dan Langkah Pembebasan dari Cengkeraman Zionis*. Jurnal Al-Tamaddun Bil. 5 (2010) 73-92. Hlm: 79

<sup>19</sup> Nor Mohd Roslan. *Op, cit*. Hlm: 77.

Pada konferensi Arab yang berlangsung tahun 1964 di Kairo, tokoh-tokoh Arab pada masa itu memprakarsai berdirinya organisasi rakyat Palestina sebagai bentuk wadah perjuangan bagi rakyat Palestina dalam menentukan nasibnya. Kemudian didirikanlah *Palestine Liberation Organization* (PLO) atau Organisasi Pembebasan Palestina<sup>20</sup>. PLO menjadi induk bagi berbagai organisasi pembebasan Palestina yang ada saat itu. Pada 22 November 1974, Majelis Umum mengundang PLO untuk berpartisipasi dalam proses persidangan dengan status pengamat, sebagai wakil dari rakyat Palestina. Status pengamat ini kemudian diperluas mencakup semua badan-badan PBB. Israel menolak melakukan negosiasi dengan PLO, meski PLO sudah diakui PBB sebagai entitas perwakilan bangsa Palestina.<sup>21</sup>

Pada 15 November tahun 1988 PLO mendeklarasikan berdirinya negara Palestina di Aljiria, ibu kota Aljazair. Presiden pertamanya adalah Yasser Arafat yang merupakan ketua PLO. Israel dan negara-negara kuat yang mendukungnya seperti Amerika Serikat tidak mengakui kemerdekaan Palestina, dan Israel tetap melanjutkan pendudukannya di wilayah Palestina. Sedangkan di PBB, Palestina tetap diwakili PLO sebagai paninjau.

Perjuangan kemerdekaan Palestina yang awalnya fokus pada perjuangan bersenjata mulai beralih pada perjuangan melalui diplomasi yang dalam hal ini Palestina diwakili oleh negara-negara Arab seperti Mesir. Terbentuklah berbagai perundingan damai yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan perdamaian seperti *Camp David*, perjanjian Oslo I 1991,

Perjanjian Oslo II 1995, perjanjian *Wye River* 1998, Perjanjian Camp David II 2000 dan lainnya. Namun berbagai perjanjian damai ini tidak menyelesaikan konflik kedua belah pihak. Konflik semakin memanas setelah Gerakan Perjuangan Hamas terbentuk tahun 1987. Hamas bertujuan memerdekakan Palestina dari jajahan Israel dengan perlawanan militer, karena menganggap diplomasi tidak cukup memberikan tekanan bagi Israel untuk melepaskan Palestina. Hamas memelopori gerakan Intifada Pertama, yakni usaha mengusir Israel dari Palestina dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan senjata batu-batuan. Gerakan ini berakhir tahun 1993, namun Hamas tetap melanjutkan dengan perjuangan bersenjata melawan Israel.

Pada 25 Januari 2006 Palestina mengadakan pemilu legislatif dan Hamas keluar sebagai pemenang. Namun, kemenangan Hamas ini memperoleh respon negatif dari Israel dan juga dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Kanada yang menganggap Hamas sebagai kelompok teroris karena menolak perdamaian dengan Israel. Israel dan Amerika Serikat kemudian menyerukan embargo ekonomi dan politik serta segala bantuan untuk Palestina. Tahun 2007 Israel memberlakukan blokade penuh terhadap Gaza<sup>22</sup> dimana markas Hamas berada, dengan membatasi masuknya bahan-bahan kebutuhan pokok ke Gaza baik melalui darat maupun laut. Blokade ini ditujukan untuk mengurangi perkembangan Hamas, namun akibat blokade ini, seluruh warga Gaza mengalami penderitaan akibat sulitnya akses dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Israel bahkan menghalangi berbagai bantuan kemanusiaan yang hendak masuk ke wilayah Gaza. Seperti tahun 2010 kapal sipil

<sup>20</sup> Mutiara Dewi, et. al. *Loc, cit.*

<sup>21</sup> Kompas Online. 30 November 2012. <<http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/0645155/Dari.Camp.David.hingga.Perjanjian.Oslo>> diakses tanggal 21 Juli 2014.

<sup>22</sup> Andrio. Penguasaan Jalus Gaza oleh Israel Tahun 2007-2009. *Jurnal Transnasional*, Vol 1, No. 2, Februari 2010. Hlm: 190.

Mavimarmara dari Turki yang membawa relawan internasional dan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza yang terisolasi diserang oleh kapal militer Israel hingga menewaskan 9 orang relawan Turki.

Pada 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009 Israel melakukan serangan terhadap wilayah Gaza, serangan ini dinamakan "*Operation Cast Lead*". Israel beralasan bahwa serangan ini dilakukan sebagai balasan terhadap roket-roket yang diluncurkan Hamas ke wilayah Israel. Dengan serangan ini Israel bertujuan untuk menghancurkan kekuatan Hamas, secara militer maupun politik dan mengakhiri kontrol Hamas di wilayah Gaza.<sup>23</sup> Namun korban sipil sangat banyak berjatuhan. Keunggulan teknologi perang yang digunakan Israel mengakibatkan kerusakan yang amat parah di pihak Palestina. Korban tewas dari pihak Palestina sekitar 1400 orang dimana separuhnya diperkirakan merupakan masyarakat sipil, sedangkan korban tewas dari pihak Israel berjumlah 13 orang termasuk 4 orang sipil. Israel kemudian secara sepihak mengumumkan gencatan senjata yang lalu diikuti oleh Hamas.<sup>24</sup>

Kebuntuan dalam proses perundingan perdamaian dengan Israel kemudian membuat Palestina berupaya meningkatkan pengakuan internasional atas kedaulatannya agar Palestina dapat meningkatkan posisi tawarnya dalam perundingan dengan Israel untuk dapat mencapai kesepakatan yang lebih baik. Palestina diwakili oleh PLO dan PA mengambil langkah di PBB yang bertujuan untuk memperkuat dukungan internasional bagi status kenegaraan Palestina. Pada tanggal 23 September 2011, pada

pembukaan sidang tahunan Majelis Umum PBB, ketua PLO dan PA Presiden Mahmoud Abbas mengajukan permohonan untuk menjadikan Palestina negara anggota penuh PBB sesuai dengan batas teritorial tahun 1967 sebelum perang Arab-Israel.<sup>25</sup> Jika Palestina diterima menjadi anggota PBB, maka Palestina berhak untuk bergabung di semua badan organisasi PBB seperti Mahkamah Internasional. Selama ini posisi yang tidak seimbang antara Palestina dan Israel, berakibat pada tidak terwujudnya perjanjian perdamaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun proposal gagal untuk mendapatkan 9 (sembilan) suara anggota Dewan Keamanan PBB sebagai syarat dukungan minimal diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.

Tahun 2012 otoritas Palestina kemudian mengalihkan upayanya untuk menjadi negara peninjau di PBB. Amerika Serikat dan Israel menyatakan penolakannya atas rencana Palestina tersebut. Namun pihak Palestina tetap melakukan pengajuan proposal peningkatan statusnya ke PBB, karena peningkatan status Palestina di PBB bukan merupakan alternatif atas perundingan damai namun dianggap bisa memperkuat posisi Palestina dalam perundingan-perundingan yang akan datang.<sup>26</sup>

Bertepatan dengan rencana Palestina tersebut, pada 14 November 2012 Israel kembali melakukan serangan militer ke wilayah Gaza.<sup>27</sup> Serangan ini menarik

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm: 193, 197.

<sup>24</sup> Jim Zanotti et. al. 2009. *Israel and Hamas: Gaza Conflict* (2008-2009). Congressional Research Service. <<http://fas.org/sgp/crs/mideast/R40101.pdf>> Diakses tanggal 15 Agustus 2014.

---

<sup>25</sup> Martin Wählisch. *Beyond a Seat in the United Nations: Palestine's U.N. Membership and International Law*. Harvard International Journal Law. Juni 2012. Online Volume 53. Hlm 227. <[https://www.aub.edu.lb/ifi/international\\_affairs/una-w/Documents/2012\\_HILJ\\_online\\_53\\_wahlisch.pdf](https://www.aub.edu.lb/ifi/international_affairs/una-w/Documents/2012_HILJ_online_53_wahlisch.pdf)> tanggal 6 Februari 2014.

<sup>26</sup> BBC Indonesia. *Palestina Ingin Kenaikan Status di PBB*. 12 November 2012. <[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121112\\_palestina\\_pb\\_b.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121112_palestina_pb_b.shtml)> Diakses tanggal 19 Juni 2014.

<sup>27</sup> BBC, *Serangan Israel Berlanjut, Minggu Paling Mematikan*, 19 November 2012, diakses dari

perhatian dunia internasional karena banyak menjatuhkan korban sipil. Serangan ini berlangsung selama delapan hari hingga tanggal 21 November 2012 kedua belah pihak mengumumkan gencatan senjata. Selama serangan berlangsung korban sipil tewas dari pihak Palestina sebanyak 168 jiwa dan lima tentara Israel.<sup>28</sup> Pada tanggal 29 November 2012, Sidang Majelis Umum PBB akhirnya mengesahkan status Palestina sebagai negara peninjau, dengan didukung oleh 138 negara, 9 negara menolak dan 41 negara mengambil posisi abstain.<sup>29</sup>

### **Hubungan Bilateral Indonesia dan Palestina**

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sejarah kedua negara sudah dimulai sejak awal-awal kemerdekaan Indonesia. Diplomasi pengakuan kemerdekaan Indonesia pertama kali dimulai dari Mesir dan Palestina. Tim delegasi Indonesia yang dikirim ke negara-negara Timur Tengah mendapat sambutan dan dukungan dari Syaikh Muhammad Amin Al-Husaini seorang mufti Palestina yang kemudian membantu Indonesia dalam melobi negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Hingga kemudian Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali pada 22 Maret 1996 dan kemudian diikuti oleh negara-negara Arab lainnya.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia selalu aktif menentang penjajahan Israel atas Palestina. Meskipun Israel telah

mengakui kemerdekaan Indonesia pada Januari 1950, namun Indonesia belum mengakui kemerdekaan Israel. Tahun 1974 Indonesia mengakui keberadaan PLO (*Palestine Liberation Organization*) yang didirikan oleh Yasser Arafat sebagai representatif dari masyarakat Palestina di kancah internasional. Tahun 1988 Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya pada 15 November di Aljiria, ibu kota Aljazair. Sehari kemudian pada 16 November Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina dan juga menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina. Sedangkan Indonesia menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selama negara Palestina masih dijajah. Tahun 1991 kantor Kedutaan Besar Palestina secara resmi dibuka di Jakarta. Tahun 1993 Presiden palestina, Yasser Arafat melakukan kunjungan ke Indonesia dan bertemu dengan presiden Soeharto.

Pada tahun 2006 setelah kemenangan Hamas dalam pemilu, Indonesia menyatakan menghormati keputusan rakyat Palestina yang telah menyelenggarakan pemilu dengan demokratis, dan menghimbau negara-negara barat yang menentang hasil pemilu tersebut untuk tidak berprangangka terhadap Hamas.<sup>30</sup> Presiden Palestina Mahmoud Abbas melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2010. Kunjungan Palestina ini bertujuan untuk meminta dukungan Indonesia, baik dalam upaya menghidupkan kembali proses perdamaian, maupun rekonsiliasi internal Palestina, khususnya antara faksi Fatah dan Hamas.<sup>31</sup> Kedua belah pihak berkomitmen akan berupaya mencari jalan bagi kemerdekaan Palestina.

---

<[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121114\\_israelattackmonday.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121114_israelattackmonday.shtml)> pada 20 Februari 2014.

<sup>28</sup> Tempo. 22 November 2012. *Israel Hamas Gencatan Senjata Palestina Suka Cita*.

<<http://www.tempo.co/read/news/2012/11/22/115443395/IsraelHamas-Gencatan-Senjata-Palestina-Sukacita/>> Diakses tanggal 19 Juli 2014.

<sup>29</sup> JPNN, *Loc, cit.*

---

<sup>30</sup> Muttaqien, *Op, cit.* Hlm: 69.

<sup>31</sup> Tabloid Diplomasi, 2010. *RI Tegaskan Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina*, Hlm: 4.

## Motivasi Dukungan Indonesia

Terdapat berbagai macam faktor yang melatarbelakangi dukungan Indonesia untuk Palestina, diantaranya:

1. Anti kolonoalisme. Sesuai dengan amanat konstitusi yakni pembukaan UUD 1945 Indonesia merupakan negara yang menolak adanya penguasaan negara terhadap negara lain. Palestina sebagai sebuah negara yang telah memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1988 telah mendapat pengakuan dari Indonesia. Palestina sebagai negara berhak untuk memiliki pemerintahan yang berdaulat bebas dari campur tangan bangsa lain. Namun pada faktanya Israel yang menjajah tanah Palestina membuat Palestina belum dapat menikmati kedaulatannya secara penuh.
2. Islam. Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan 82.5% nya merupakan muslim yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia. Palestina sebagai bagian dari tanah Arab yang merupakan daerah dimana agama Islam berasal, memiliki keterikatan yang kuat dengan Islam itu sendiri. Sehingga masyarakat Indonesia memiliki simpati yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
3. Kemanusiaan. Konflik antara Israel dan Palestina sering menyebabkan bencana kemanusiaan di wilayah ini akibat korban perang dan penjajahan Israel., perang sering kali terjadi dan jatuhnya korban jiwa tak dapat dihindarkan. Sejarah mencatat sejak Inggris menyatakan komitmennya untuk mendukung pendirian negara Israel di tanah Palestina bangsa Yahudi melakukan berbagai pengusiran, penyiksaan dan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Bahkan ada yang menyebut apa yang dilakukan Israel adalah tindakan genosida atau pembersihan etnis, karena Israel tidak pandang bulu dalam setiap serangannya yang banyak menewaskan warga sipil, baik itu wanita maupun anak-anak.
4. Perdamaian Dunia. Hari ini, banyak sarjana dan politisi menganggap bahwa solusi dari masalah Palestina adalah satu-satunya kunci untuk perdamaian dan stabilitas internasional.<sup>32</sup> Mendukung kemerdekaan Palestina dan menyelesaikan konflik ini merupakan langkah dalam mewujudkan perdamaian dunia.
5. Stabilitas Politik dalam Negeri. Konflik Palestina merupakan konflik yang menarik perhatian masyarakat internasional terutama muslim, termasuk di Indonesia Di Indonesia. Isu ini dapat dikategori ke dalam arena konstituen, yang artinya pemerintah melihat bahwa isu ini dapat menjadi jalan untuk mendapat simpati publik.<sup>33</sup> Sehingga opini publik terkait isu ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan luar negeri.
6. Agenda Utama Politik Luar Negeri. Menurut M. Muttaqien konflik Arab-Israel merupakan isu penting bagi politik luar negeri Indonesia. Konflik ini merupakan konflik yang menarik perhatian publik internasional.<sup>34</sup> Indonesia merupakan anggota aktif dari berbagai organisasi internasional seperti OKI, GNB, *New Asian African Strategic Partnership* (NAASP) yang mana organisasi-organisasi tersebut memiliki perhatian khusus terhadap konflik Israel-Palestina. Sehingga penting bagi Indonesia untuk menunjukkan keseriusannya dalam upaya mendukung dan

<sup>32</sup> Sadaka. *Op, cit.* Hlm: 6

<sup>33</sup> Muttaqien, *Loc, cit.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

memperjuangkan kemerdekaan  
Palestina.

### **Bentuk Dukungan Indonesia**

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, Indonesia selalu memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina yang terjajah. Dukungan ini dilakukan dalam berbagai bentuk yang mungkin oleh segenap bangsa Indonesia, baik pemerintahan maupun rakyat Indonesia.

1. Konferensi Asia Afrika . Pada tahun 1955 Indonesia aktif dalam memprakarsai dan menjadi tuan rumah bagi diselenggarakannya konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi ini bertujuan sebagai wadah konsolidasi bagi negara-negara Asia dan Afrika untuk bersatu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan gerakan anti-kolonialisme serta mendukung negara yang belum memperoleh kemerdekaan, termasuk Palestina.

2. Asian Games 1962. Tahun 1962 Indonesia menjadi penyelenggara Asian Games, Indonesia menunjukkan solidaritasnya dalam mendukung Palestina dengan menolak memberikan visa bagi atlet Israel untuk ikut berpartisipasi.

3. Gerakan Non-Blok (GNB). GNB Pada Maret 2011 Indonesia menjadi penyelenggara Pertemuan Tingkat Menteri Ke-16 GNB di Bali. Pada momen ini Indonesia bersama negara anggota memperkuat komitmen dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia mengusulkan penggalangan suara bagi penerimaan Palestina menjadi anggota penuh PBB. GNB kemudian melakukan penggalangan suara terhadap pengakuan Palestina sebagai anggota PBB dan Palestina memperoleh dukungan dari 112 negara.

4. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Isu Palestina merupakan agenda utama OKI. Pada September 2011 Sidang Majelis Umum PBB ke-66 digelar di New York, yang membahas penyelesaian isu Palestina

dan Israel. Disela-sela proses sidang, pertemuan OKI diselenggarakan dan Indonesia mengajak negara-negara OKI dan masyarakat internasional untuk mendukung Palestina masuk sebagai anggota PBB ke-194. Pada 28 September 2012 pertemuan yang sama kembali di gelar di Markas PBB, New York, dan Indonesia kembali mengajak anggota OKI untuk serius memperjuangkan peningkatan status Palestina di PBB.<sup>35</sup>

5. DK PBB Tahun 2007-2008. Tahun 2007-2008 Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia selalu mendorong agar DK PBB mengeluarkan keputusan terkait masalah Palestina, termasuk dalam bentuk presidential statement (PRST) maupun resolusi.<sup>36</sup>

6. NAASP. Indonesia tergabung dalam kerja sama regional *New Asian African Strategic Partnership (NAASP)*. Indonesia telah menggagas *NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine*, di Jakarta, tanggal 14-15 Juli 2008. Indonesia menyampaikan komitmen untuk mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, bukan saja secara politis melainkan juga melalui kerja sama teknis berupa pembangunan kapasitas bagi 1000 warga Palestina.<sup>37</sup> Program ini telah berjalan sejak 2008 hingga 2013.

7. Bantuan Finansial dan Pembangunan Rumah Sakit di Gaza. Indonesia juga telah menyampaikan bantuan finansial terhadap

---

<sup>35</sup> *Indonesia Terus Perjuangkan Nasib Palestina di PBB Bersama OKI.*

<<http://news.detik.com/read/2012/09/29/050835/2045062/10/indonesia-terus-perjuangkan-nasib-palestina-di-pbb-bersama-oki>> diakses tanggal 11 September 2014

<sup>36</sup>

<http://kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=15&l=id>

<sup>37</sup> *Kemenlu. Ringkasan Eksekutif Diplomasi 2011.*

Hlm: 200 <[http://www.embassyofindonesia.org/features/pdf/Diplomasi\\_2011.pdf](http://www.embassyofindonesia.org/features/pdf/Diplomasi_2011.pdf)> Diakses tanggal 21 Agustus 2014

Palestina, termasuk dalam bentuk *pledge* pada *Paris Donor Conference 2007* dan selama Krisis Gaza 2008-2009, yang masing-masing berjumlah USD 1 Juta. Selain itu, KBRI Kairo telah menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza Januari 2011, berupa peralatan medis senilai USD 83.325,21 yang berasal dari Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA). Indonesia juga mengalokasikan dana sejumlah Rp 20 Miliar untuk membangun *Indonesia Cardiac Center* di Rumah Sakit Al-Shifa, Gaza. Melalui *Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C) lembaga kemanusiaan berbasis di Jakarta, rakyat Indonesia mendirikan Rumah Sakit Indonesia di atas tanah wakaf pemerintah Palestina.<sup>38</sup>

8. Kunjungan DPR RI ke Palestina. Pada 29 November 2012 sebanyak 8 orang anggota Komisi I DPR RI bersama dengan beberapa anggota LSM dan jurnalis melakukan kunjungan ke Palestina, tepatnya wilayah Gaza. Kunjungan ini merupakan dukungan politik dan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Selain itu kunjungan ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan moral bagi Palestina dan mendesak Israel menghentikan serangannya ke wilayah Palestina.

Selain pemerintah, masyarakat Indonesia juga turut aktif dalam memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Dukungan ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, profesional, pengusaha, politisi, tokoh maupun masyarakat biasa, baik yang terorganisir ataupun bersifat aksidental. Berikut berbagai bentuk dukungan yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk Palestina.

---

<sup>38</sup> Viva. Diakses dari <<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/368533-rumah-sakit-indonesia-di-gaza-secantik-hati-rakyat-indonesia>> pada 19 September 2014.

a. Terbentuknya berbagai organisasi masyarakat untuk dukung Palestina.

Terdapat berbagai organisasi kemasyarakatan, yayasan maupun LSM di Indonesia yang dibentuk dengan tujuan untuk mendukung Palestina. Organisasi ini memiliki struktur dan bergerak skala nasional. Mereka melakukan berbagai cara untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia untuk Palestina seperti penggalangan dana, aksi kemanusiaan dan bahkan mengirim relawan langsung ke Palestina. Beberapa organisasi ini diantaranya;

1. Komini Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP). KNRP adalah salah satu lembaga kemanusiaan yang peduli terhadap permasalahan masjid Al Aqsha dan isu kemanusiaan di Palestina. Berdiri sejak Mei 2006, KNRP telah banyak menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan seni untuk menggalang dana dan opini untuk Palestina.<sup>39</sup>
2. Komite Nasional untuk Solidaritas Palestina (KISPA). Didirikan pada 14 Mei 2002, dalam visinya tertulis organisasi ini bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk peduli terhadap perjuangan bangsa Palestina meraih kemerdekaan, khususnya dalam menjaga kesucian Masjid Al-Aqsha.
3. Yayasan Sahabat Al Aqsa. Yayasan ini berdiri pada tahun 2007 yang mendukung perjuangan kemerdekaan Masjidil Aqsha dan rakyat Palestina. Bergerak dalam penyebaran informasi, penggalangan dana, dan penyaluran dana bantuan maupun relawan langsung ke rakyat Palestina.

b. Aksi solidaritas dukung Palestina  
Konflik Israel Palestina  
mendapatkan pemberitaan yang masif media

---

<sup>39</sup> <<http://www.knrp.org/#>> diakses pada 11 September 2014

dari media Indonesia, terutama saat Israel melakukan serangan ke wilayah Gaza yang menjatuhkan banyak korban sipil di pihak Palestina. Seperti serangan Israel pada pertengahan November 2012, pemberitaan yang masif dari media massa terkait kondisi Palestina membuat masyarakat Indonesia bersimpati atas kondisi rakyat Palestina. Berbagai aksi solidaritas untuk Palestina pun banyak dilakukan berbagai kalangan masyarakat Indonesia, dengan tujuan untuk mengancam Israel, menuntut pemerintah untuk lebih aktif membantu Palestina dan utamanya adalah menggalang dana untuk para korban perang

c. Kampanye Boikot Produk Yahudi

Bentuk lain dari dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina adalah kampanye pemboikotan terhadap produk-produk perusahaan yang menyumbangkan sebagian keuntungannya pada Israel. Terdapat beberapa perusahaan MNC yang kebanyakan berbasis di Amerika Serikat yang memberikan bantuan dana, baik kemudian untuk dijadikan persenjataan bagi militer Israel maupun yang digunakan untuk memperkuat infrastrukturnya. Beberapa perusahaan ini bahkan pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Israel sebagai penyokong utama Israel.<sup>40</sup>

### **Diplomasi Mendukung Peningkatan Status Palestina di PBB**

Perjuangan Palestina untuk meningkatkan pengakuan dan dukungan internasional terhadap perjuangannya kemerdekaannya menjadi isu penting yang mendapat perhatian Indonesia. Sebagai negara sahabat Indonesia turut aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Perjuangan Palestina untuk diakui oleh PBB menjadi momen bagi Indonesia untuk menegaskan dukungannya, salah satunya

---

<sup>40</sup> Shofwan Al Banna. 2006. *Palestine, Emang Gue Pikirin?*. Yogyakarta: ProYou. Hlm: 292-293.

dengan mendukung Palestina menjadi negara peninjau di PBB tahun 2012.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdepan dan konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina demi mewujudkan perdamaian di Timur Tengah dengan solusi dua negara (*two state solution*). Penciptaan perdamaian di Timur Tengah membutuhkan adanya koreksi terhadap ketidakadilan yang telah lama dialami rakyat Palestina. Hal ini hanya dapat dicapai dengan solusi dua negara, yaitu Israel dan Palestina yang hidup berdampingan secara aman dan damai. Upaya peningkatan status Palestina di PBB menjadi momen bagi Indonesia untuk semakin menegaskan dukungannya.

Diplomasi Indonesia dalam mendukung peningkatan status Palestina di PBB telah dimulai sejak tahun 2010 setelah Palestina mewacanakan diri menjadi negara anggota penuh PBB. Diplomasi dilakukan untuk meminta negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk sesegera mungkin mengakui kemerdekaan Palestina. Indonesia senantiasa aktif dalam berbagai forum internasional, tahun 2010 Indonesia mengagas pertemuan untuk membahas peningkatan status Palestina yang antara lain dihadiri oleh Menlu Brazil, Menlu Afrika Selatan dan Menlu Palestina. Hasilnya, mayoritas negara Amerika Selatan sepakat untuk mendukung diakuinya negara Palestina di PBB.<sup>41</sup>

Pada pertemuan KTM GNB di Bali pada tanggal 23-27 Mei 2011, telah disetujui usulan Indonesia agar negara-negara anggota GNB menyusun *roadmap* untuk mendukung keanggotaan Palestina di PBB. Indonesia juga telah mendorong agar negara-negara anggota PBB yang belum memberikan pengakuan terhadap Palestina untuk segera memberikan pengakuannya. Selama proses KTM berlangsung, Menlu RI dan Menlu Mesir bertemu pada Selasa, 24

---

<sup>41</sup> Tabloid Diplomasi, *Loc, cit.*

Mei mendiskusikan upaya kerjasama yang dapat dilakukan dalam melakukan tindakan konkrit untuk mendukung Palestina. Indonesia dan Mesir sepakat untuk membagi tugas sesuai dengan daerah masing-masing dalam mengajak negara-negara GNB yang belum mengakui Palestina untuk segera memberikan pengakuannya. Pada kesempatan ini, Indonesia mengajak anggota GNB untuk menjadikan isu Palestina sebagai prioritas.

Pada tanggal 23 September 2011 Palestina mengajukan permohonan untuk menjadikan Palestina negara anggota penuh PBB sesuai dengan batas teritorial tahun 1967. Seiring dengan proses yang diajukan di DK untuk keanggotaan penuh di PBB, pihak Palestina menyampaikan aplikasi keanggotaan penuh di UNESCO. *General Conference UNESCO* ke-36 menyetujui masuknya Palestina sebagai anggota penuh UNESCO sebagai anggota ke-194 melalui pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober 2011 di Paris. Indonesia memberikan dukungan penuh bagi aplikasi ini dalam pemungutan suara. Pada 11 November 2011 permohonan Palestina gagal mendapatkan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Dukungan untuk permohonan Palestina hanya mencapai 8 (delapan) suara anggota Dewan Keamanan PBB dari minimal 9 (sembilan) suara yang dibutuhkan tanpa adanya penolakan.

### **Peran Indonesia dalam Mendukung Palestina Menjadi Negara Peninjau di PBB Tahun 2012**

Tahun 2012 Palestina kembali melakukan upaya memperoleh peningkatan status di PBB. Dalam menyambut agenda sidang tahunan majelis umum PBB pada tanggal 29 November 2012, tanggal 12 November 2012 media<sup>42</sup> memberitakan

---

<sup>42</sup> BBC Indonesia, *Palestina Ingin Kenaikan Status di PBB*. 12 November 2012. Diakses dari <[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121112\\_palestina\\_pbb.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121112_palestina_pbb.shtml)> tanggal 19 Juni 2014

rencana Palestina mengajukan peningkatan statusnya di PBB menjadi peninjau di PBB, kali ini sebagai negara peninjau yang di putuskan sepenuhnya melalui Sidang Majelis Umum PBB tanpa harus direkomendasikan terlebih dahulu oleh Dewan Keamanan PBB. Usulan Palestina diterima bila memperoleh persetujuan dari 2/3 negara anggota PBB.

Usaha Palestina kali ini juga terancam mendapat hambatan dari Israel dan Amerika Serikat yang menganggap upaya Palestina ini menghindari perundingan damai secara bilateral antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut presiden Palestina upaya ini dilakukan bukan untuk menghindari perundingan bilateral dengan Israel melainkan untuk memperkuat posisi Palestina dalam perundingan berikutnya. Israel telah berusaha untuk mempengaruhi negara-negara Eropa dan juga negara-negara barat lainnya untuk menolak usulan Palestina untuk menjadi negara peninjau di PBB ataupun abstain dalam pemungutan suara. Begitupun dengan Amerika Serikat yang berada di sisi Israel.<sup>43</sup>

Menanggapi upaya Palestina, pemerintah Indonesia turut aktif dalam mendukung rencana Palestina tersebut. Sidang Majelis Umum berlangsung dengan anggota sebanyak 193 negara, dimana diplomasi multilateral berlangsung. Indonesia sebagai negara sahabat yang konsisten dalam mendukung Palestina, memaksimalkan perannya melalui diplomasi multilateral pada sidang ini untuk mendukung Palestina untuk dapat menjadi negara peninjau di PBB.

---

[bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121112\\_palestina\\_pbb.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121112_palestina_pbb.shtml) tanggal 19 Juni 2014

<sup>43</sup> Pekka Hakala. 2012. *Quick Policy Insight: Palestine's Bid For UN Observer State Status Advances Despite EU Hesitation*. European Parliament: Policy Department, Directorate-General for External Policies.

1. Indonesia Memprakarsai Draft Resolusi Peningkatan Status Palestina Menjadi Negara Peninjau

Indonesia menjadi salah satu dari 60 negara yang memprakarsai atau menjadi *co sponsor* dari draft resolusi yang diajukan Palestina pada tanggal 26 November 2012 pada anggota Majelis Umum PBB untuk dibahas dalam agenda sidang terkait *Question Of Palestine*. Draft resolusi ini berjudul “*Status Palestine In The United Nations*”. Rancangan resolusi memaparkan berbagai hal yang menjadi landasan dan pendukung bagi permohonan Palestina untuk menjadi negara peninjau di PBB.

2. Partisipasi Aktif Indonesia Dalam Sidang Majelis Umum PBB Ke-67

Sidang Majelis Umum PBB Ke-67 dilaksanakan pada 29 November 2012 di markas besar PBB, New York. Dari 193 yang seharusnya hadir, hanya 188 negara yang hadir dan 5 negara tidak hadir, yakni Equatorial Guinea, Kiribati, Liberia, Madagaskar dan Ukraina. Madagaskar merupakan salah satu negara yang menjadi *co sponsor* dalam resolusi peningkatan status Palestina untuk menjadi negara peninjau, namun tidak hadir dalam agenda sidang ini. Indonesia hadir dalam agenda sidang ini dengan diwakili langsung oleh Menlu Marty Natalegawa. Dari 188 negara yang mengirimkan delegasinya, hanya tiga negara yang mengirimkan Menlu sebagai perwakilan, yakni Indonesia, Turki dan Kanada.

3. Pernyataan Indonesia di Hadapan Peserta Sidang Majelis Umum PBB.

Selama Sidang Majelis Umum, berlangsung sesi perdebatan dimana beberapa delegasi negara diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidatonya terkait dengan isu yang sedang dibahas, yakni peningkatan status Palestina menjadi negara Peninjau. Negara yang mendukung resolusi ini dan negara-negara yang tidak mendukung memberikan pandangannya

sebagai pembuka sebelum pemungutan suara dilakukan. Perwakilan Sudan, Daff-Alla Elhag Ali Osman mempersentasikan rancangan resolusi “*status of Palestine in the United Nations*” yang bertujuan untuk pemberian status negara peninjau bagi Palestina. Kemudian pidato dilanjutkan oleh Presiden Otoritas Palestina, Muhammad Abbas. Perwakilan Israel memberikan pandangannya, menurutnya tidak satupun dari isi rancangan resolusi tersebut yang mengakomodasi kepentingan vital Israel, sehingga Israel tidak bisa menerimanya.

Selanjutnya kesempatan diberikan bagi negara yang mendukung resolusi ini. Indonesia pada kesempatan ini menyampaikan bahwa mendukung peningkatan status Palestina adalah hal yang benar untuk dilakukan oleh masyarakat internasional. Dunia tidak seharusnya terus menutup mata terhadap penderitaan panjang rakyat Palestina, pengingkaran terhadap kebebasan dasar, hak asasi manusia serta obstruksi hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan menentukan kemerdekaannya. Negara merdeka Palestina dengan hak dan tanggung jawab yang sama dengan orang-orang dari negara lain akan memberikan kontribusi pada pencapaian yang keadilan dan perdamaian yang komprehensif di Timur Tengah.<sup>44</sup>

Indonesia menekankan bahwa meskipun Palestina masih mendapatkan rintangan yang besar dari penjajahan Israel, namun Palestina telah mampu dan memiliki kapasitas untuk berperan sebagai sebuah negara. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat internasional untuk menolak permohonan Palestina menjadi negara peninjau. Indonesia juga mengajak anggota Majelis Umum untuk mendukung terwujudnya Palestina menjadi anggota penuh PBB. Mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka merupakan dukungan terhadap solusi dua negara.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

Indonesia juga menyampaikan bahwa baru-baru ini kekerasan tanpa pandang bulu dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional di Jalur Gaza, telah menjadi pengingat betapa pentingnya untuk kembali memulai percepatan proses perdamaian dengan sungguh-sungguh. Sehingga penting untuk memulai kembali proses perdamaian demi mencapai kondisi yang kondusif untuk memulai kembali proses perundingan damai, termasuk dihentikannya pembangunan pemukiman Israel yang tidak sah, mengangkat blokade Gaza dan penghukuman terhadap kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Indonesia juga menegaskan arti penting dialog yang dilakukan di antara faksi-faksi yang ada di internal rakyat Palestina. Menjadikan Palestina sebagai negara peninjau merupakan pertanda itikad untuk mengedepankan upaya diplomasi dan menjauhi kekerasan.

#### 4. Dukungan Indonesia Terhadap Status Palestina Sebagai Negara Peninjau PBB dalam Pemungutan Suara.

Setelah penyampaian draf resolusi dan pandangan dari beberapa negara terhadap resolusi tersebut, Presiden Majelis Umum PBB mengakhiri sesi perdebatan dan kemudian pemungutan suara dilakukan. Pada pemungutan suara ini Indonesia memberikan suara setuju pada resolusi tersebut. Hasil dari pemungutan suara ini secara keseluruhan adalah, 138 negara mendukung, 9 negara menentang, 41 negara abstain dan 5 negara absen.

#### **Dukungan Rakyat Indonesia**

Selain pemerintah, masyarakat Indonesia sebagai kelompok masyarakat menyadari peluang dan perannya untuk turut andil dalam mendukung bangsa Palestina memperoleh kemerdekaannya setelah berbagai informasi yang diterima dari berbagai media tentang penderitaan rakyat Palestina akibat penjajahan Israel. Diamond

dan McDonald mengembangkan konsep diplomasi multijalur menjadi sembilan jalur untuk dapat menggambarkan secara utuh kompleksitas dari aktivitas diplomasi penciptaan perdamaian, yakni antara lain:.

1. Jalur pemerintah, diplomasi melalui jalan perdamaian. Jalur ini merupakan jalan utama yang dilakukan Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam berbagai kesempatan Indonesia selalu menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Termasuk dalam upaya peningkatan status Palestina di PBB, Indonesia selalu aktif mendukung Palestina dalam berbagai forum internasional. Pada momen perjuangan peningkatan status Palestina menjadi negara peninjau di PBB, pemerintah Eksekutif Indonesia aktif melalui diplomasi di PBB. Sedangkan legislatif, anggota DPR RI melakukan kunjungan ke Palestina pada 29 November 2012 untuk menunjukkan dukungan bagi Palestina.

2. Jalur non pemerintah/profesional, atau perdamaian melalui resolusi konflik. Terdapat berbagai kelompok non-pemerintah yang aktif menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Serta melakukan berbagai upaya untuk mengajak masyarakat Indonesia turut langsung dalam mendukung rakyat Palestina dalam berbagai aspek, seperti bantuan dana kemanusiaan dan pengiriman relawan ke Palestina. Kelompok ini antara lain adalah KNRP (Komisi Nasional untuk Rakyat Palestina) dan KISPA (Komisi Nasional Peduli Palestina).

3. Jalur bisnis, atau diplomasi perdamaian melalui perdagangan (*Commerce*). Dalam bidang ini, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Palestina. Pada tahun 2012 volume perdagangan antara Indonesia dan Palestina mengalami peningkatan menjadi 1 juta dollar AS, yang

sebelumnya pada tahun 2011 hanya bernilai 117.700 dollar AS.<sup>45</sup>

4. Jalur warga negara privat, diplomasi perdamaian melalui peran individu. Warga negara Indonesia juga turut aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Seperti pada tahun 2010, 12 warga negara Indonesia turut dalam aksi kemanusiaan mendukung Palestina dengan ikut bergabung dengan Kapal Mavi Marmara yang membawa bantuan kemanusiaan bagi Palestina. Meski Kapal ini tidak berhasil berlabuh di Palestina akibat serangan tentara Israel di laut internasional. Tahun 2012 tercatat lebih dari 48.000 warga Indonesia berkunjung ke Yerusalem. Palestina memiliki kota tujuan ziarah religi lain seperti Bethlehem, Yerikho dan Hebron yang sering dikunjungi umat Kristiani Indonesia.<sup>46</sup>

5. Jalur penelitian, pelatihan, dan pendidikan, diplomasi perdamaian melalui pembelajaran. Dalam bidang ini, Indonesia tergabung dalam kerja sama regional *New Asian African Strategic Partnership (NAASP)* dan mengaggas *NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine*. Indonesia telah melakukan pembangunan kapasitas bagi 1000 warga Palestina sejak 2008 hingga 2013. Selain itu pihak non pemerintah seperti *Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI)* turut membantu mengembangkan kapasitas SDM Palestina dengan memberikan program beasiswa pendidikan di Indonesia bagi warga Palestina.<sup>47</sup>

<sup>45</sup>

<<http://economy.okezone.com/read/2014/02/27/320/947220/pm-palestina-kunjungi-indonesia-bahas-hubungan-bilateral>> diakses tanggal 8 Januari 2015.

<sup>46</sup> Warta Fokus. <<http://wartafokus.com/indonesia-sambut-baik-business-forum-dan-trade-expo-untuk-membantu-pembangunan-palestina/>> diakses tanggal 8 Januari 2015.

<sup>47</sup>

Republika.

<<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/14/03/30/n38kkh-bsmi-kuliahkan-warga-palestina-di-indonesia>> diakses pada 7 Januari 2015.

6. Jalur aktivisme, atau diplomasi perdamaian melalui advokasi. Di Indonesia gerakan aktivis mahasiswa sering melakukan berbagai aksi dan kampanye menyuarkan dukungan terhadap Palestina. Seperti aksi turun ke jalan bersama masyarakat yang sering dilakukan oleh aktivis KAMMI, HMI dan juga kelembagaan mahasiswa seperti BEM universitas. Aksi ini semakin meningkat disaat tindakan militer Israel meningkat di Palestina yang menimbulkan banyaknya korban jiwa. Para aktivis menyatakan kecaman terhadap tindakan Israel dan menuntut pemerintah maupun badan dunia seperti PBB untuk serius penyelesaian konflik ini.

7. Jalur agama, atau diplomasi perdamaian melalui kepercayaan. Semangat keagamaan merupakan salah satu dasar utama atas dukungan bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tergabung dalam organisasi Islam internasional yakni OKI. Isu Palestina merupakan agenda utama OKI, dimana Indonesia berpartisipasi aktif di dalamnya. Di dalam negeri, terdapat berbagai organisasi berbasis keagamaan yang didirikan demi menyuarkan dukungan terhadap Palestina seperti KNRP, KISPA, Sahabat Al-Aqsa dan lainnya.

8. Jalur Pendanaan, atau diplomasi perdamaian melalui pemberdayaan sumber daya. Setiap aktifitas dukungan terhadap Palestina di Indonesia didominasi dengan bantuan pemberian pendanaan. Organisasi-organisasi utama pendukung Palestina seperti KNRP dan KISPA utamanya bergerak dalam bidang pengumpulan dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina. KNRP misalnya aktif melakukan berbagai konser amal diseluruh Indonesia dan mengirimkan hasilnya untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban agresi Israel. Masyarakat Indonesia baik yang

tergabung dalam organisasi mahasiswa, kepemudaan, dan aktifitas lainnya juga sering ditemukan turun ke jalan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dikirimkan ke Palestina.

9. Jalur Komunikasi dan media, atau diplomasi perdamaian melalui informasi. Tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina tidak lepas dari pemberitaan yang dilakukan media dalam mengabarkan kondisi tentang Palestina. Berbagai media komunikasi di Indonesia selalu aktif memberitakan pada masyarakat tentang apa yang terjadi di Palestina. Hal ini menjadi pemicu utama munculnya simpati yang besar dan semangat rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan untuk terhadap kemerdekaan Palestina, termasuk mendesak pemerintah untuk terus aktif mendukung kemerdekaan Palestina melalui diplomasi kenegaraan. Sehingga bagi pemerintah Indonesia isu Palestina merupakan isu penting bagi stabilitas politik dalam negeri.

Dalam perjuangan Indonesia mendukung peningkatan status Palestina di PBB, jalur kedua hingga jalur ke sembilan dalam diplomasi multijalur menjadi dorongan yang semakin menguatkan diplomasi jalur pertama, yakni pemerintah Indonesia dalam mendukung Palestina memperoleh dukungan internasional. Melalui berbagai forum internasional, Indonesia mengoptimalkan dukungan terhadap upaya meningkatkan status Palestina menjadi negara peninjau di PBB dengan berpartisipasi aktif dalam diplomasi multilateral.

### **Kesimpulan**

Konflik Palestina Israel telah berlangsung lebih dari enam dekade. Israel sejak awal pendiriannya telah mendapatkan dukungan dari negara-negara besar yang memiliki pengaruh kuat dalam politik

internasional, seperti Amerika Serikat. Sedangkan Palestina masih berjuang untuk merdeka dari penguasaan Israel dan berdaulat sepenuhnya. Pendukung Palestina mayoritas berasal dari negara-negara berkembang dengan semangat islamisme, anti kolonialisme dan kemanusiaan. Setiap langkah dalam memperoleh perdamaian antara Palestina dan Israel sering kali mengalami kebuntuan dan kegagalan akibat ketidakseimbangan posisi dalam perundingan.

Demi menguatkan posisinya dalam perundingan dengan Israel, Palestina berusaha meningkatkan pengakuan dan dukungan internasional, salah satunya dengan berupaya menjadi negara anggota penuh PBB. Palestina kemudian mengajukan permohonan untuk menjadi penuh PBB. Namun usaha ini gagal memperoleh rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Tahun 2012 kembali melakukan upayanya memperoleh peningkatan status di PBB, kali ini sebagai negara peninjau yang akan di putuskan sepenuhnya melalui Sidang Majelis Umum PBB.

Konflik Palestina dan Israel yang belum menemukan jalan damai serta dukungan AS dan negara-negara besar terhadap Israel membuat sebagian negara-negara lain belum mengakui kemerdekaan Palestina. Sehingga perlu perjuangan bagi Palestina untuk meyakinkan negara-negara tersebut untuk dapat mengakui kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia turut aktif dalam diplomasi mengajak negara-negara anggota Majelis Umum PBB untuk mendukung rencana Palestina tersebut melalui organisasi-organisasi Internasional lain seperti GNB dan OKI. Indonesia menjadi salah satu dari 60 negara *co sponsor* draf resolusi peningkatan status Palestina menjadi negara paninjau yang pada tanggal 26 November 2012 dikirimkan pada seluruh anggota Majelis Umum PBB. Pada tanggal

29 November 2012 Indonesia hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB Ke-67 dilaksanakan di markas besar PBB, New York. Indonesia sebagai pihak pendukung resolusi juga memberikan pidato mengajak peserta sidang untuk mendukung Palestina sebelum pemungutan suara dilakukan. Pada pemungutan suara ini Indonesia memberikan suara setuju pada resolusi tersebut. Dengan demikian, Indonesia telah secara aktif mendukung peningkatan status Palestina menjadi negara peninjau di PBB tahun 2012 melalui diplomasi multilateral yang berlangsung selama proses Sidang Majelis Umum ke-67 tersebut.

## Referensi

### Jurnal

- Andrio. Februari 2010. *Penguasaan Jalus Gaza oleh Israel Tahun 2007-2009*. Jurnal Transnasional, Vol 1, No. 2.
- Azra, Azyumardi. 2000. "Islam In Indonesia Foreign Policy: Assessing the Impacts of Islamic Revivalism During the soeharto Era". *Studia Islamika Indonesia Journal for Islamic Studies*. Vol. 7, no. 3.
- Kristanto, Dadan. 2013. "Diplomasi Palestina Menjadi Negara Pengamat Non Anggota Di Perserikatan Bangsa – Bangsa Tahun 2012". Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal Online. <<http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t33419.pdf>>
- Martin Wählisch. Juni 2012. *Beyond a Seat in the United Nations: Palestine's U.N. Membership and International Law*. Harvard International Journal Law. Online Volume 53.
- Muttaqien, M. Januari-Juni 2013. "Domestic Politics and Indonesia's Foreign Policy on the Arab-Israeli

*Conflict*". Departemen of International Relations Universitas Airlangga, Surabaya Global & Strategis, Th. 7, No. 1.

- Roslan, Nor Mohd. 2010. *Konflik Israel Palestin dari Aspek Sejarah Moderen dan Langkah Pembebasan dari Cengkeraman Zionis*. *Jurnal Al-Tamaddun Bil*. 5 (2010) 73-92.

### Buku

- \_\_\_\_\_. 2005. *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*. Oxford [uk] Oxford University Press.
- Akasaka, Kiyoo. 2008. *The Question of Palestine and the United Nations*, United Nations, New York.
- Al Banna, Shofwan. 2006. *Palestine, Emang Gue Pikirin?*. Yogyakarta: ProYou.
- Berridge, G. R. 2002. *Diplomacy, Theory and Practice Second Edition*, London: Palgrave.
- Department of Public Information, 2000. *Basic facts about unite nations*, United Nations Publication, New York.
- Djelantik, Sukawarsini. 2008. *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dorsianna, Kartika Octaviyanti. 2012. *Motivasi Amerika Serikat Menghalangi Keinginan Palestina Menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Tahun 2011*, Pekanbaru: Universitas Riau.
- Gandhi, Teguh Wangsa. 2009. *Akar Konflik Israel Palestina: Tinjauan Demografi, Sejarah, Geopolitik dan Agama*, Yogyakarta: Ramadhan Press.
- Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. 2005. *Pengantar Studi Hubungan*

- Internasional*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mahbubani, Kishore. 2003, *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. <<http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199588862.001.0001/oxfordhb-9780199588862-e-14>>
- Mas' oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3S.
- Mutiara Dewi, et, al. 2008. *Gerakan Rakyat Palestina: Dari Deklarasi Negara Israel Sampai Terbentuknya Negara Palestina*, Yogyakarta: UNY.
- Scobbie, Iain & Hibbin, Sarah. 2009. *The Israel-Palestine. Conflict in International Law: Territorial Issue*. U.S: Middle East Project.
- Shaleh, Muhsin Muhammad. 2002. *Palestina, Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi*. Gema Insani Perss. Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2004. *Praktik Diplomasi*, Depok: Bp Iblam.
- Zanotti Jim et. al. 2011. *Palestinian Initiatives for 2011 at the United Nations*. Congressional Reserch Service.
- Zanotti, Jim et. al. 2009. *Israel and Hamas: Gaza Conflict (2008-2009)*. Congressional Reserch Service. <<http://fas.org/sgp/crs/mideast/R40101.pdf>>
- Website
- About the General Assembly, Functions and Power*. <<http://www.un.org/en/ga/about/index.shtml>> Diakses tanggal 12 Februari 14.
- Asian African Museum. *Sejarah Konferensi Asia Africa*. <<http://asianafrikanmuseum.org/sejarah-konferensi-asia-afrika/>> diakses pada 14 Februari 2014.
- BBC News. *Israel Palestian Maps, Israel Founded*. <[http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle\\_east/03/v3\\_israel\\_palestinians/maps/html/israel\\_founded.stm](http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/v3_israel_palestinians/maps/html/israel_founded.stm)> Diakses pada 06 Februari 2014.
- BBC. *History Of Mid-East Peace Talks*. <<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-11103745>> Diakses pada 5 September 2014.
- Eramuslim. <<http://www.eramuslim.com/berita/info-umat/sahabat-al-aqsha-silatullah-keluarga-indonesia-palestina.htm>> diakses pada 11 September 2014.
- Haaretz. 12 November 2012. <<http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-we-will-annul-oslo-accords-if-palestinians-see-upgraded-un-status.premium-1.477520>> diakses 15 Desember 2014.
- In Minds. <<http://www.inminds.com/boycott-israel-2012.php>> diakses pada 11 September 2014.
- Jewish Virtual Library. <[https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsourc/Society\\_&\\_Culture/israel\\_palestine\\_pop.html](https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsourc/Society_&_Culture/israel_palestine_pop.html)> tanggal 21 Juli 2014.
- Kementerian Luar Negeri RI, <<http://kemlu.go.id>> diakses tanggal 21 Juli 2014.
- KISPA. <<http://www.kispa.org/>> diakses pada 11 September 2014.
- KNRP. <<http://www.knrp.org/#>> diakses pada 11 September 2014.
- Maps Of World. “*About Palestine*”. <<http://www.mapsofworld.com/palestine/information/>> diakses pada 02 Januari 2014.

- Palestine UN.  
<<http://palestineun.org/about-palestine/diplomatic-relations/>> diakses tanggal 18 Oktober 2014.
- Turn To Islam.*  
<<http://turntoislam.com/community/threads/194-palestine-count-down.79694/>> diakses tanggal 5 September 2014
- UNISPAL. *Chronological Review of Events Relating to the Question of Palestine.* Monthly media monitoring review. September 2012.  
<<http://unispal.un.org/Unispal.Nsf/e9abb7dfb6e319c90525675900535dba/66727ecc7511302a85257aad006d0912?OpenDocument#In%20his%20address%20to%20the%20sixty-seven>> 15 Desember 2014.
- United Nations. *Non Members.*  
<<http://www.un.org/en/members/nonmembers.shtml>> diakses tanggal 12 Februari 14.
- Majalah  
Tabloid Diplomasi, 2010.  
<[http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2010/DIPLOMASI%20JULI%202010\\_2.pdf](http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2010/DIPLOMASI%20JULI%202010_2.pdf)>. diakses pada 18 Agustus 2014.
- Ringkasan Eksekutif Diplomasi 2011.*  
<[http://www.embassyofindonesia.org/features/pdf/Diplomasi\\_2011.pdf](http://www.embassyofindonesia.org/features/pdf/Diplomasi_2011.pdf)>. Diakses tanggal 21 Agustus 2014.
- Artikel  
*Dari Camp David Hingga Perjanjian Oslo.*  
<<http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/0645155/Dari.Camp.David.hingga.Perjanjian.Oslo>> diakses tanggal 21 Juli 2014.
- Dibalik Perjuangan Proklamasi Kemerdekaan Palestina Ada Tangan Palestina dan Negara Timur Tengah.*  
<<http://suaramuslim.net/dibalik-perjuangan-proklamasi-kemerdekaan-indonesia-ada-tangan-palestina-dan-negara-timur-tengah.>> Diakses 11 September 2014.
- Menengok Pasang Surut Hubungan Dagang Indonesia Israel.*  
<<http://www.merdeka.com/uang/menengok-pasang-surut-hubungan-dagang-indonesia-israel.html>> diakses tanggal 15 Desember 2014.
- Mengapa Bangsa Indonesia Harus Peduli Palestina.*  
<<http://www.islamedia.web.id/2012/11/mengapa-bangsa-indonesia-harus-peduli.html>> diakses pada 21 Juli 2012.
- Negara dengan Jumlah Muslim Terbanyak Dunia.*  
<<http://www.menjejakdunia.com/2014/06/5-negara-dengan-jumlah-penduduk-muslim-terbanyak-didunia.html>> .> diakses pada 06 Juli 2014.
- Second Intifada.* 2010. <<http://www.jmcc.org/fastfactspag.aspx?tname=88>> Diakses tanggal 21 Juli 2014.
- Sejarah Palestina Terjajah.*  
<<http://www.islamedia.co/2012/11/sejarah-palestina-terjajah-dan.html>> diakses tanggal 21 Juli 2014.
- The Badly Kept Secret of Israel S Trade Trhoughtout the Muslim World.*  
<<http://www.haaretz.com/business/the-badly-kept-secret-of-israel-s-trade-throughout-the-muslim-world-1.408103>> diakses tanggal 15 Desember 2014.
- Working Paper.  
Hakala, Pekka. 2012. *Quick Policy Insight: Palestine's Bid For UN Observer State Status Advances Despite EU Hesitation.* European Parliament: Policy Department,

- Directorate-General for External Policies.
- Kusumaningrum, Demeiati Nur. 2011. *Diplomasi Palestina Untuk Merdeka Dan Menjadi Anggota Penuh PBB Tahun 2011*. 2011. <[http://www.slideshare.net/demeiati\\_i\\_n\\_kusumaningrum/diplo-masi-palestina-untuk-merdeka-dan-menjadi-anggota-penuh-pbb-tahun-2011](http://www.slideshare.net/demeiati_i_n_kusumaningrum/diplo-masi-palestina-untuk-merdeka-dan-menjadi-anggota-penuh-pbb-tahun-2011)>, Diakses pada 24 September 2013
- Muhammad Fakhry Ghafur. 2012. *Tantangan Status Baru Palestina di PBB*, <<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/timur-tengah/743-tantangan-status-baru-palestina-di-pbb->> diakses pada 13 juni 2013.
- Sadaka. *Palestinian state recognised by UN*. The ireland palestine alliance. <<http://www.sadaka.ie/Articles/Briefings/BRIEFING-Palestinian-state-recognised-by-UN.pdf>> 8 februari 2014.
- Vera Ellen Paat. *Posisi Amerika Serikat dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel*. Fisip Unsrat.
- Wulansari, Ica. *Komunikasi Internasional Indonesia Dalam Upaya Mendukung Palestina Sebagai Negara yang Berdaulat*. Universitas Budi Luhur. <[https://www.academia.edu/4964281/Komunikasi\\_Internasional\\_Indonesia\\_Dalam\\_Upaya\\_Mendukung\\_Palestina\\_Sebagai\\_Negara\\_yang\\_Berdaulat\\_Tema\\_Komunikasi\\_Internasional\\_Indonesia\\_Dalam\\_Kancah\\_Global](https://www.academia.edu/4964281/Komunikasi_Internasional_Indonesia_Dalam_Upaya_Mendukung_Palestina_Sebagai_Negara_yang_Berdaulat_Tema_Komunikasi_Internasional_Indonesia_Dalam_Kancah_Global)> diakses pada 11 September 2014.
- Dokumen
- Dokumen GA/11317, *General Assembly Votes Overwhelmingly To Accord Palestine 'Non-Member Observer State' Status In United Nations*. 29 November 2014. <<http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11317.doc.htm> > Diakses pada 06 Februari 2014.
- Dokumen UNISPAL. A/67/L.28. 26 November 2012. <<http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/181C72112F4D0E0685257AC500515C6>> Diakses pada 16 April 2014.
- The Palestine Nasional Charter*. <[http://www.acpr.org.il/publications/books/38-Zero-plo\\_charter.pdf](http://www.acpr.org.il/publications/books/38-Zero-plo_charter.pdf)> Diakses pada 06 Februari 2014.